

EFISIENSI PERSEDIAAN BAHAN BAKU MENGGUNAKAN FASILITAS KERINGANAN TARIF BEA MASUK MELALUI SKEMA *FREE TRADE AREA* (FTA)

oleh :

Heni Anggraeni*)
Dr. Encep Sopandi, S.Sos., M.Si.**)

ABSTRAK

Bahan baku memiliki peranan yang sangat penting bagi kelancaran proses produksi demi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Persediaan bahan baku bagi perusahaan manufaktur terutama yang padat karya seperti manufaktur pakaian jadi (garment) memerlukan perencanaan dan perhitungan yang sangat matang dikarenakan erat hubungannya dengan masa produksi guna memenuhi ketepatan waktu pengiriman sesuai dengan permintaan dari pihak pembeli (buyer) di luar negeri dan/atau kepuasan pelanggan/konsumen di Indonesia. PT Jusindo Sumberprakarsa merupakan perusahaan manufaktur pakaian jadi yang bergerak dalam bidang ekspor impor dan penjualan lokal yang bahan baku utamanya berupa kain. PT Jusindo Sumberprakarsa adalah salah satu perusahaan yang memanfaatkan perjanjian perdagangan internasional melalui skema Free Trade Area, yang mendapatkan keuntungan yaitu menggunakan tarif preferensial lebih rendah dari tarif yang berlaku umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi persediaan bahan baku menggunakan fasilitas keringanan bea masuk melalui skema Free Trade Area, untuk mencapai tujuan penelitian tersebut maka digunakan metode kualitatif dengan cara menganalisis aspek-aspek efisiensi yaitu dengan menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan bisnis yang ada kaitannya dengan persediaan bahan baku (kain) yaitu dari segi teknis, waktu, proses, sistem dan prosedur sampai akhirnya kain tersebut masuk ke gudang bahan baku (raw material warehouse) sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pembelian bahan baku secara efisien dan tepat sasaran, terlebih saat ini sebagian besar perusahaan manufaktur di Indonesia menggantungkan persediaan bahan bakunya dari luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melakukan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi pembelian bahan baku dengan menggunakan lima indikator yaitu teknis, sarana dan prasarana, waktu, Sosial (Sumber daya manusia) dan biaya ternyata tidak dapat tercapai secara maksimal.

Kata kunci : Persediaan Bahan Baku, Free Trade Area

**Heni Anggraeni Mahasiswa Prodi Adminiterasi Bisnis
Dr. Encep Sopandi, S.Sos., M.Si.**)** . Dosen Di Fisip Universitas Nurtanio

EFFICIENCY OF RAW MATERIALS INVENTORY USING THE FACILITY OF REDUCTION OF IMPORT DUTIES THROUGH THE FREE TRADE AREA (FTA) SCHEME

Heni Anggraeni *)
Dr. Encep Sopandi, S.Sos., M.Si.**).

ABSTRACT

Raw materials have a very important role for the smooth production process for the survival of a company. Inventories of raw materials for manufacturing companies, especially those that are labor-intensive such as garment manufacturing, require very careful planning and calculations because they are closely related to the production period in order to meet on time delivery in accordance with requests from overseas buyers and/or customer/consumer satisfaction in Indonesia. PT Jusindo Sumberprakarsa is a garment manufacturing company engaged in export, import and local sales, whose main raw material is cloth. PT Jusindo Sumberprakarsa is one of the companies that take advantage of international trade agreements through the Free Trade Area scheme, which benefits from using preferential rates that are lower than generally accepted rates. This study aims to determine the efficiency level of raw material inventory using import duty relief facilities through the Free Trade Area scheme. relation to the supply of raw materials (fabric), namely from a technical point of view, time, process, system and procedure until finally the fabric enters the raw material warehouse so that through this research it is hoped that it can be the basis for making decisions to purchase raw materials efficiently and effectively and on target, especially now that most manufacturing companies in Indonesia depend on their raw material supplies from abroad. This study uses descriptive qualitative research methods, with data collection techniques conducting observations and interviews. The results showed that the efficiency of purchasing raw materials using five indicators, namely technical, facilities and infrastructure, time, social (human resources) and costs, was not able to be achieved optimally.

Keywords: Raw Material Inventory, Free Trade Area

Heni Anggraeni *) **Mahasiswa Prodi Adminiterasi Bisnis**
Dr. Encep Sopandi, S.Sos., M.Si. **) **Dosen Di Fisip Universitas Nurtanio**

PENDAHULUAN

Pada perusahaan manufaktur bahan baku merupakan faktor terpenting untuk kelancaran proses produksi. Ketidakersediaannya bahan baku dalam jangka waktu tertentu akan mempengaruhi keberlangsungan hidup suatu perusahaan.

Perkembangan perdagangan di dunia yang semakin pesat dengan semakin terbukanya perdagangan bebas untuk

berbagai jenis produk seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih semakin mempermudah kita untuk mendapatkan produk barang jadi dari berbagai penjuru dunia. Salah satunya yaitu produk pakaian jadi (*garment*). Dipihak lain perusahaan manufaktur *garment* di Indonesia yang awalnya hanya bersaing dengan perusahaan lokal kini semakin berat untuk bisa memasarkan produknya

dikarenakan mereka “dipaksa” bersaing dengan produk- produk luar negeri baik itu dari segi kualitas maupun harga yang relatif lebih murah dibanding dengan produk dalam negeri.

PT Jusindo Sumberpraksa yang merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi pakaian jadi (*garment*) berskala nasional dan internasional berusaha untuk tetap bertahan di tengah persaingan perdagangan bebas dengan cara menekan biaya produksi tanpa menurunkan kualitas produk. Salah satu caranya, yaitu dengan melakukan pembelian bahan baku impor dengan memanfaatkan fasilitas keringanan tarif bea masuk melalui skema *Free Trade Area* (FTA).

Sebelum membahas lebih lanjut ada baiknya penulis memberikan informasi secara singkat terkait FTA dengan harapan mempunyai pemahaman yang sama dengan pembaca. *Free Trade Area* (FTA) adalah sebuah bentuk kerja sama perdagangan bebas antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu area tertentu. Adapun *Free Trade Agreement* yang juga terkenal dengan istilah FTA merupakan sebuah bentuk perjanjian (*agreement*) antara pihak- pihak yang akan melakukan suatu kerja sama perdagangan bebas. Dalam penelitian ini FTA yang dimaksud adalah *Free Trade Area*.

Adapun salah satu manfaat FTA bagi pengusaha khususnya di Indonesia adalah adanya pembebasan dan atau pengurangan tarif bea masuk terhadap barang-barang tertentu yang telah disepakati dalam suatu perjanjian antara satu dan atau beberapa negara yang melakukan kerjasama perdagangan bebas sehingga hal ini dapat menekan beban biaya produksi dalam negeri. Atas pembebasan dan atau pengurangan tarif bea masuk terhadap barang yang diimpor dari negara-negara yang melakukan perjanjian kerjasama perdagangan bebas ini berpengaruh terhadap nilai barang yang kemudian akan mempengaruhi perekonomian negara.

Pengusaha dalam menjalankan kegiatan usahanya terbebani oleh biaya operasional dalam penyediaan bahan baku untuk proses produksinya, biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar salah satunya dikarenakan tingginya tarif bea masuk (BM) sehingga

mengakibatkan beban biaya produksi semakin tinggi. Namun dengan adanya fasilitas keringanan BM dengan menggunakan skema FTA maka pihak pengusaha dapat menekan beban biaya produksi dalam menetapkan harga pokok produksi (HPP) sehingga dapat meningkatkan daya saing industri. Tarif BM yang berlaku dalam skema FTA disebut dengan tarif preferensi.

“Tarif preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional”. (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.04/2017 : Pasal 1 : 14)

Peran serta Pemerintah Indonesia dalam upaya memberikan beberapa kemudahan keringanan BM dalam bentuk kebijakan fiskal maupun fasilitas yang diberikan melalui kementerian keuangan kepada para pengusaha sangat dirasakan besar manfaatnya dalam menekan beban biaya produksi.

FTA itu sendiri dalam perkembangannya semakin bertambah seiring dengan kepentingan perdagangan bebas di setiap negara yang melakukan sebuah perjanjian yang salah satu tujuannya adalah agar negara yang terlibat dalam sebuah perjanjian FTA mendapatkan keuntungan dan atau timbal balik atas perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh masing-masing negara.

Salah satu bentuk kerja sama antara Indonesia dengan negara lain adalah dengan dibentuknya *Asean Free Trade Area* (AFTA). AFTA adalah sebuah bentuk kerja sama antara Negara-Negara Asean yang dibentuk pada tahun 2002.

Dalam perkembangannya AFTA melakukan kerjasama dengan beberapa Negara antara lain dalam bentuk kerja sama dengan negara :

1. Asean (*Asean Trade in Goods Agreement – ATIGA*)
2. China (*Asean China Free Trade Area – ACFTA*)
3. Korea (*Asean Korea Free Trade Area – AKFTA*)

4. India (*Asean India Free Trade Area – AIFTA*)
5. Austria dan New Zealand (*Asean Australia New Zealand Free Trade Agreement - AANZFTA*)
6. Japan (*Asean Japan Comprehensive Economic Partnership – AJCEP*)

Atau kerja sama bilateral antara Indonesia dengan negara :

1. Japan (Indonesia - Japan Economic Partnership Agreement – IJEPA)
2. Chile (Indonesia - *Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement - ICCEPA*)

PT Jusindo Sumberprakarsa yang dalam hal ini sebagai objek penelitian memanfaatkan 2 (dua) fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yaitu :

1. Fasilitas pembebasan bea masuk (BM) dan pajak penambahan nilai (PPN) atas barang impor yang barang hasil produksinya diekspor kembali.
2. Fasilitas keringanan tarif BM dengan menggunakan skema FTA

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan berfokus kepada :

1. Prosedur persediaan bahan baku
2. Mekanisme pembelian bahan baku
3. Efisiensi pembelian bahan baku dengan menggunakan indikator :
 - a. Teknis
 - b. Sarana dan prasarana
 - c. Waktu
 - d. Sosial (Sumber daya manusia)
 - e. Biaya

Lokasi Penelitian :

PT Jusindo Sumberprakarsa, Jl. Cijerah Wetan No. 72, Melong, Cimahi Selatan Kota Cimahi merupakan perusahaan manufaktur pakaian jadi (*garment*) yang bergerak dalam bidang ekspor impor dan penjualan lokal.

Teknis Pengumpulan dan Analisis Data :

Melakukan observasi dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tingkat efisiensi pembelian bahan baku dalam

kaitannya dengan persediaan bahan baku guna kelancaran proses produksi di PT Jusindo Sumberprakarsa. Penulis melakukan observasi dan wawancara ke divisi *Merchandiser*, kalkulasi dan *Purchasing* PT Jusindo Sumberprakarsa untuk kemudian disajikan kepada pembaca sehingga diharapkan dapat mengetahui tingkat efisiensi persediaan bahan baku menggunakan fasilitas keringanan tarif bea masuk melalui skema FTA dan untuk mempersempit bahasan pada penelitian kali ini, yang dijadikan bahan penelitian adalah yang menggunakan perjanjian kerja sama perdagangan bebas antara negara-negara Asean dengan China melalui *Asean China Free Trade Area (ACFTA)*.

1. Prosedur Pembelian Bahan Baku

Prosedur Pembelian bahan baku di PT Jusindo Sumberprakarsa, langkah yang diambil oleh divisi pembelian yaitu melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap *supplier-supplier* lokal sesuai dengan data yang diterima dari Divisi *Merchandiser*. Data dari Divisi *Merchandiser* itu sendiri adalah hasil perhitungan dari Divisi kalkulasi (*Costing*). Divisi *Costing* menghitung kebutuhan bahan baku (material) dengan mempertimbangkan berapa persen yang harus ditambahkan dari total kebutuhan bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi pakaian jadi yang akan menjadi bahan baku sisa hasil produksi (meminimalisir limbah/*waste*) maupun bahan baku yang tidak layak untuk dipakai dikarenakan cacat. Untuk menghitung *allowance* ini Divisi *Costing* melakukan koordinasi dengan bagian marker yang struktur organisasinya berada di bawah Divisi *Development sample*, tahap awal ini sudah termasuk upaya pihak perusahaan untuk menekan persediaan bahan baku agar tidak menimbulkan stok bahan baku yang tidak terpakai di Divisi Gudang Bahan Baku (*Material warehouse*). Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghindari risiko operasional yang terjadi akibat salah perhitungan kebutuhan pemakaian bahan baku yang akan berakibat fatal salah satunya adalah :

- a. Stok bahan baku akan menumpuk di gudang, semakin banyak terjadi kesalahan maka akan semakin banyak bahan baku yang tersimpan di dalam gudang sehingga menimbulkan semakin terbatasnya ruang untuk menyimpan bahan baku lainnya.
- b. Bahan baku yang tidak terpakai adalah aset perusahaan yang mengendap yang bukan hal mustahil merupakan salah satu laba perusahaan yang tertahan.
- c. Bahan baku asal impor yang tidak terpakai dilarang untuk diperdagangkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil, Pasal 11 ayat 2 : “Importir TPT dilarang memperdagangkan dan/atau memindahtangankan TPT yang telah diimpor kepada pihak lain.” Maka disini dapat dilihat bahwa betapa pentingnya perhitungan kebutuhan pemakaian bahan baku atas setiap *job order* agar tidak ada bahan baku yang tidak terpakai (tersisa).
- d. Apabila bahan baku asal impor menggunakan fasilitas kemudahan import tujuan ekspor (KITE) maka penanganan atas bahan baku yang tidak dipakai mempunyai prosedur tersendiri yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang pada kesempatan ini tidak penulis bahas secara mendalam.

2. Mekanisme Pembelian Bahan Baku

Setelah semua data dinyatakan benar melalui pengecekan ulang dan telah mendapatkan konfirmasi dari Manager *Merchandiser*, maka data yang telah tersaji disampaikan kepada Divisi *Purchasing* untuk dapat diproses lebih lanjut. Tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh Divisi *Purchasing* yaitu mempelajari dan menganalisa jenis-jenis kain sesuai dengan data yang telah diterima dari Divisi *Merchandiser*, kemudian melakukan pengecekan kepada pihak *supplier-supplier* lokal dan *supplier* yang berada di luar negeri (impor). Setelah dilakukan pengecekan terhadap jenis-jenis kain, maka dilakukan analisa :

- a. Apakah variasi jenis kain yang diinginkan oleh pihak *buyer* tersedia ?
- b. Apakah harganya bisa masuk dengan *budget* perusahaan ?
- c. Apakah terdapat kendala pada saat proses *development sample* untuk jenis kain baru ?
- d. Apakah *fast response* pada saat proses *development sample* ?
- e. Apakah kualitas kain sesuai dengan standar permintaan dari pihak *buyer* ?
- f. Apakah *leadtime* produksi terpenuhi ?
- g. Apakah tanggal pengiriman tepat waktu ?
- h. Apakah perijinan impor berupa dokumen Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI TPT) yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktorat Perdagangan Luar Negeri tersedia jika jenis kain yang diinginkan oleh pihak *buyer* ternyata hanya dapat dibeli dari *supplier* luar negeri ?

3. Efisiensi Pembelian Bahan Baku

Seperti yang telah disebutkan di atas, dalam upaya efisiensi terhadap pembelian bahan baku, maka salah satu langkah awal yang diambil oleh perusahaan adalah dengan menganalisa terhadap jenis-jenis kain yang akan dilakukan pembelian oleh pihak perusahaan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Teknis Pembelian Bahan Baku

1) Variasi jenis kain

Variasi jenis kain jauh yang tersedia di *supplier* lokal jauh lebih sedikit dibanding dengan *supplier* impor. *Supplier* lokal seringkali tidak dapat menyediakan jenis kain yang variatif dikarenakan terkendala oleh berbagai teknis, salah satunya adalah karena secara teknologi mesin- mesin yang dipergunakan oleh perusahaan tekstil di Indonesia belum secanggih mesin- mesin yang berada di luar negeri yang dalam hal ini adalah mesin yang dipergunakan oleh *supplier-supplier* di China.

2) Harga

Salah satu pembentuk harga adalah kecilnya beban biaya produksi, ketika beban biaya produksi dapat ditekan maka harga pokok produksi (HPP)

sebagai dasar dalam menentukan harga jual dapat ditetapkan dengan harga yang sesuai sehingga dapat bersaing di pasaran. Harga yang relatif lebih murah dengan kualitas yang lebih bagus pada akhirnya menjadi suatu pilihan untuk melakukan kegiatan impor dalam memenuhi kebutuhan bahan baku untuk proses produksi

3) Proses *development* untuk jenis kain baru

Proses *development* untuk jenis kain baru (*new fabric*) adalah proses dimana pabrik tekstil membuat sample kain sesuai dengan jenis kain yang diminta oleh pihak pembeli, baik itu dari segi konstruksi, gramasi dan lain-lain. *Supplier* dari luar negeri (China) mempunyai keunggulan lebih dalam proses *development* untuk jenis kain baru.

4) *Fast response* pada saat proses *development sample*

Pentingnya komunikasi bisnis dalam merespon setiap keinginan pihak pembeli agar tidak terjadi kendala dalam kelancaran proses bisnis selanjutnya adalah salah satunya ditentukan oleh seberapa cepat kita merespon setiap keinginan dan atau komplek dari pihak pembeli untuk selanjutnya melakukan perbaikan (*improvement*) sesuai dengan harapan pihak pembeli.

5) Kualitas Kain

Tidak dapat dipungkiri bahwa ketika peranan teknologi dapat mempengaruhi hasil akhir suatu proses demikian pula dengan proses produksi kain yang dihasilkan oleh mesin dengan teknologi modern maka menghasilkan kain-kain yang relatif lebih bagus kualitasnya dengan minimnya gagal produksi dikarenakan cacat kain atau *shading*. Kualitas kain menentukan apakah pihak buyer pada akhirnya memutuskan untuk menurunkan *Job Order* kepada pihak *Supplier*, karena untuk memproduksi pakaian terutama pakaian bayi diperlukan laboratorium tes atas kain yang dipakai sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan oleh *Buyer*.

6) *Leadtime* produksi lebih cepat

Budaya masyarakat dalam suatu daerah atau wilayah dapat menentukan seberapa besar kualitas dan produktivitas yang dihasilkan dalam suatu kegiatan produksi. Kebiasaan masyarakat Indonesia jelas tidak bisa disamaratakan dengan kebiasaan masyarakat yang berada di Jepang, China atau negara lainnya. Penulis sempat melakukan perjalanan bisnis ke Negara China dan menurut pengamatan pribadi, masyarakat China yang bekerja sebagai operator jahit hanya berhenti bekerja untuk makan saja pada saat jam istirahat. Setelah makan mereka kembali bekerja meskipun jam istirahat belum berakhir. Mungkin hal ini merupakan salah satu alasan mengapa Negara China dapat memproduksi barang dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang relatif singkat dibanding negara lainnya. Sebagai ilustrasi apabila Negara lain dalam memproduksi *T-shirt* 1,000 Pcs dalam waktu 1 (satu) bulan, Negara China bisa jadi dapat memproduksi *T-shirt* 1,000 Pcs dalam waktu 2 Minggu.

7) Pengiriman tepat waktu

Didukung oleh teknologi mesin dan sumber daya manusia yang produktif, maka proses produksi berjalan lancar dan maksimal sehingga proses pengiriman bahan baku tepat waktu sehingga tidak mengganggu kelancaran proses produksi

8) Ketersediaan ijin impor berupa dokumen Persetujuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil (PI TPT) yang diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktorat Perdagangan Luar Negeri. Dokumen PI TPT menentukan dapat dilakukan atau tidaknya pembelian impor dengan menggunakan fasilitas keringanan tarif bea masuk melalui skema FTA. Adapun selain PI TPT, perusahaan diwajibkan menyampaikan dokumen lain, yaitu berupa Laporan *Surveyor* (LS) yang mana LS tersebut terbit untuk memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil, Pasal 12 ayat 1-2 : "Setiap pelaksanaan impor TPT harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis di pelabuhan muat. Verifikasi atau penelusuran teknis yang

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh *surveyor* yang ditetapkan oleh Menteri.”

Dengan berbagai pertimbangan di atas dan setelah mendapatkan persetujuan dari pihak *Buyer* ada beberapa bahan baku (kain) yang dipesan melalui *supplier* lokal (dalam negeri) dan sebagian lainnya dipesan melalui *supplier* Impor.

Divisi *Purchasing* kemudian melakukan pengelompokan terhadap data kebutuhan pemakaian bahan baku yang akan diproduksi untuk pemenuhan pesanan pihak *Buyer* di luar negeri (melalui kegiatan Ekspor) dengan pemenuhan kebutuhan produksi untuk penjualan di dalam negeri. Pembelian bahan baku untuk kebutuhan produksi dengan tujuan ekspor dapat menggunakan beberapa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah namun khusus untuk produksi dengan tujuan penjualan dalam negeri (lokal) PT Jusindo Sumberprakarsa melakukan pembelian lokal dan impor dengan menggunakan fasilitas skema FTA.

Terhadap persediaan pengadaan bahan baku yang diputuskan pembelian bahan bakunya dengan cara impor, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Divisi *Purchasing* adalah melakukan koordinasi dengan Divisi Impor untuk memastikan ketersediaannya kuota atas daftar barang-barang yang akan diimpor dalam dokumen PI TPT. PI TPT berisikan kuota yang diberikan yang terdapat dalam daftar rencana impor selama 1 (satu) tahun masa periode perijinan dihitung pada saat PI TPT tersebut diterbitkan. Apabila didapati bahwa atas barang-barang yang akan diimpor tersebut ternyata kuotanya habis (tidak mencukupi) dan atau ada beberapa jenis kain yang belum tercantum dalam PI TPT maka Divisi Impor melakukan perubahan PI TPT kepada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia yang saat ini dapat dilakukan secara *online*. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Divisi *Purchasing* yaitu membuka *Purchase Order* (PO) sesuai dengan data yang telah diberikan sebelumnya oleh pihak *Merchandiser*

b. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam suatu perusahaan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam upaya efisiensi. Namun demikian semakin banyak sarana dan prasarana yang diperlukan dalam suatu kegiatan maka akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan guna pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut sehingga tujuan dari efisiensi tidak akan tercapai. Dalam kaitannya dengan kegiatan proses persediaan bahan baku di PT Jusindo Sumberprakarsa sarana dan prasarana yang dibutuhkan sangat efisien karena komunikasi hanya melalui email dan menggunakan aplikasi *Whatsapp* dan *Line* untuk komunikasi yang bersifat instan dan informal yang bersifat teknis yang memerlukan keputusan saat itu juga. Adapun proses *development sample* untuk jenis kain baru (*new fabric*), maka setelah PT Jusindo Sumberprakarsa menerima contoh kain (*lab dip*) dari pihak *supplier* di luar negeri yang dikirimkan lewat jasa pengiriman (*courier services*), maka cukup memberikan tanggapan lewat email dengan melampirkan foto kain untuk kemudian dapat ditindaklanjuti oleh pihak *supplier* sampai dengan mendapatkan persetujuan (*approval*) dari pihak PT Jusindo Sumberprakarsa.

c. Waktu

Proses persediaan bahan baku melalui kegiatan impor memakan waktu relatif lebih cepat dibanding melakukan pembelian dari pemasok (*supplier*) lokal. Untuk jenis kain baru yang memerlukan *new development* seringkali *supplier* lokal tidak dapat membuat jenis kain yang diinginkan oleh pihak pembeli (*buyer*). Proses *new development supplier* lokal memerlukan waktu 1–2 bulan tergantung *space* dari pihak *supplier*, belum termasuk kendala dari *supplier* lokal yang akhirnya tidak dapat membuat jenis kain yang baru sedangkan jika dilakukan oleh *supplier* impor proses ini hanya memerlukan waktu tidak lebih dari 3 (tiga) minggu dan sebagian besar *supplier* impor dapat membuat jenis kain baru sesuai dengan keinginan. Untuk

proses produksi kain jenis dari benang aneka warna (*yarn dyed woven*), *supplier* lokal mengerjakan dalam waktu 4 bulan sedangkan *supplier* impor cukup memakan waktu 35 hari maka kain sudah siap untuk dikirim ke Indonesia. Untuk jenis kain yang dicetak (*printing woven*) *supplier* lokal mengerjakan dalam waktu kurang lebih 3 bulan sedangkan jika melalui *supplier* impor hanya memerlukan waktu kurang lebih 1.5 bulan maka kain siap untuk dikirim ke Indonesia. Dari sini bisa kita lihat seberapa besar tingkat efisiensi waktu yang bisa digunakan oleh pihak perusahaan untuk melakukan proses produksi terhadap bahan baku yang diterima dari pihak *supplier* sehingga dapat mempengaruhi kelancaran proses produksi guna ketepatan pengiriman barang hasil produksi sesuai dengan permintaan pihak pembeli.

d. Sosial (Sumberdaya manusia)

Sumberdaya manusia, yaitu karyawan adalah merupakan salah satu aset perusahaan yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Ketika suatu perusahaan melakukan pengelolaan sumber daya manusianya dengan baik maka akan menghasilkan terciptanya efisiensi kerja dalam sistem dan prosedur sehingga tujuan perusahaan yaitu *output* yang dihasilkan sesuai dengan target tercapai. Didukung oleh *software* yang dimiliki perusahaan dalam hal pengolahan dan pengelolaan data perusahaan dari awal proses terbentuknya order hingga pengiriman (*shipment*) dan/atau penjualan lokal maka kemudahan akses data yang diperlukan menjadi salah satu faktor utama semakin cepatnya proses dalam melakukan suatu kegiatan/pekerjaan, didukung dengan sistem perijinan secara *online* dengan bentuk aplikasi yang mudah diakses oleh *stake holder* menjadikan proses persediaan bahan baku dengan menggunakan fasilitas keringanan bea masuk melalui skema FTA ini tercapai dengan secara maksimal sesuai dengan keinginan perusahaan.

e. Biaya

Biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan pembelian bahan baku akan mempengaruhi penawaran atas produk yang dihasilkan. Semakin tinggi biaya yang dikeluarkan maka harga jual akan semakin tinggi sehingga kalah bersaing dengan kompetitor. Namun jika biaya yang dikeluarkan rendah, maka perusahaan dapat bersaing dengan kompetitor dalam menjual produknya, semakin banyak penawaran dengan harga yang kompetitif maka perusahaan akan mendapatkan margin keuntungan yang lebih besar .

Pengaruh dari keringanan bea masuk terhadap pembelian bahan baku dengan menggunakan fasilitas keringanan tarif bea masuk melalui skema *Free Trade Area* (FTA) dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Jika PT Jusindo Sumberprakarsa mengimpor 1,000 Meter kain dari China dengan harga USD 2,500.00 dengan menggunakan fasilitas keringanan bea masuk dalam hal ini untuk China adalah skema ACFTA, maka PT Jusindo Sumberprakarsa tidak mempunyai kewajiban membayar BM atas barang tersebut, misalnya BM atas kain yang diimpor adalah sebesar 15%. Namun apabila PT Jusindo Sumberprakarsa tidak menggunakan fasilitas keringanan bea masuk, maka bea masuk sebesar 15% dari harga barang akan menjadi beban biaya sehingga akan mempengaruhi harga jual terhadap produk yang dihasilkan yaitu pakaian jadi.

Efisiensi pembelian bahan baku dengan menggunakan 5 indikator, yaitu : Teknis, sarana dan prasarana, waktu, sosial (sumber daya manusia) dan biaya ternyata tidak dapat tercapai dengan maksimal ketika ada pengaruh eksternal perusahaan yaitu adanya kebijakan dari pemerintah terkait *safe guard*. *Safe guard* diberlakukan untuk melindungi industri dalam negeri, jelas menjadi kontradiksi dengan adanya perdagangan bebas. Dengan diberlakukannya *safe guard* sehingga adanya pengenaan bea masuk tambahan (BMT) terhadap produk-produk tertentu termasuk tekstil dan produk tekstil maka yang asalnya perusahaan tidak terbebani oleh pengenaan bea masuk menjadi

dikenakan penambahan BMT meskipun telah menggunakan skema ACFTA.

KESIMPULAN

PT Jusindo Sumberprakarsa dalam upaya efisiensi terhadap pembelian bahan baku memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dengan menggunakan fasilitas keringanan tarif bea masuk melalui skema *Free Trade Area* (FTA), dikarenakan pembelian bahan baku dari Negara China, maka Skema FTA yang dipergunakan adalah Asean China *Free Trade Area* (ACFTA).

Efisiensi biaya tidak tercapai dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah terkait *safe guard*, sehingga timbul beban biaya baru yang lebih tinggi dikarenakan tarif bea masuk tambahan (BMT) yang cukup tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Hadi, Dedi Abdul

2013 Modul Pengantar *Free Trade Agreement, Workshop Rule of Origin*, Jakarta, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea dan Cukai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.04/2017 Tentang tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 Tentang perubahan atas peraturan menteri perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 Tentang ketentuan impor Tekstil dan produk Tekstil

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 64/M-DAG/PER/8/2017 Tentang ketentuan impor Tekstil dan produk Tekstil

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 Tentang ketentuan impor Tekstil dan produk Tekstil

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.010/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebasan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor